

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP AKTIVITAS
MANAJEMEN AKUNTANSI PEMERINTAHAN MAJENE
(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene)**

***INFLUENCE OF GOOD GOVERNANCE ON MAJENE GOVERNMENT
ACCOUNTING MANAGEMENT ACTIVITIES***



**NURUL FITRAH
C02 20 004**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP AKTIVITAS
MANAJEMEN AKUNTANSI PEMERINTAHAN MAJENE
(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene)**




**NURUL FITRAH
C02 20 004**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh


Pembimbing I

Pembimbing II


Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP : 19930820 201903 1 016


Muhammad Husan Ansari, SE., M.Ak
NIP : 19900621 202203 1 002

**Menyetujui
Koordinator Program Studi**


Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP : 19831203 201903 2

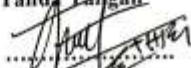
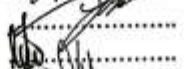
**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP AKTIVITAS
MANAJEMEN AKUNTANSI PEMERINTAHAN MAJENE
(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NURUL FITRAH
C02 20 004**

Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal 21 Oktober 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak	Ketua	1) 
2. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Sekretaris	2) 
3. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Anggota	3) 
4. Hisyam Ichsan, SE., M.Si	Anggota	4) 
5. Indra Basir, SE., M.Ak	Anggota	5) 

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP : 19930820 201903 1 016

Pembimbing II



Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak
NIP : 19900621 202203 1 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi



ABSTRAK

NURUL FITRAH; Pengaruh *Good Governance* Terhadap Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan Majene (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene); “dibimbing oleh pembimbing I Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M. Ak. Dan pembimbing II Muhammad Ihsan Ansari, SE., M. Ak”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh *Good Governance* Terhadap Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. Menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini melibatkan 35 pegawai yang dipilih melalui teknik purposive sampling dari populasi pegawai Badan Pendapatan Daerah setempat. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS, meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas), regresi sederhana, serta uji hipotesis (uji T dan R Square). Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh positif terhadap Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas *Good Governance* akan berdampak pada perbaikan Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci : *Good Governance*, Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan Majene

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal pemantauan dana dan memastikan bahwa aset digunakan secara efisien dan produktif, *Good Governance* memainkan peran yang sangat penting. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat sebagai bagian dari *Good Governance*. Hasilnya, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, sementara transparansi dan akuntabilitas keuangan ditingkatkan melalui tata kelola yang baik.

Pemerintahan yang baik memiliki struktur yang efisien dan efektif, serta kerangka pengawasan yang kuat yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan selaras dengan tujuan kebijakan. Dengan cara ini, administrasi yang kuat dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dijamin melalui administrasi yang hebat.

Selain itu, pengelolaan industri akuntan publik sangat bertumpu pada prinsip efektivitas *Good Governance*. Pemerintah mempunyai hak istimewa untuk menjamin bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan benar untuk mencapai tujuan pembangunan negara. Sistem pengendalian internal yang solid, perencanaan anggaran yang tepat, dan sistem akuntansi yang dapat diandalkan semuanya diperlukan agar hal ini dapat terwujud.

Bagian penting dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang cerdas dan bermutu tinggi adalah administrasi keuangan pemerintah yang lugas dan

efisien (administrasi hebat). Untuk mencapai hal ini, tindakan akuntansi manajemen memainkan peran penting dan strategis (Mardiasmo, 2009). Pengaturan, pengarsipan pertukaran, estimasi, pengumuman moneter, pemeriksaan moneter, pengendalian internal, dan konsistensi dengan peraturan dan pedoman material hanyalah sebagian dari siklus dan latihan pembukuan eksekutif yang teratur yang diingat untuk latihan pembukuan dewan (*Weygandt et al.*, 2015).

Fungsi utama kegiatan pengelolaan akuntansi pemerintahan adalah untuk memfasilitasi prosedur perencanaan dan penganggaran yang efektif. Menurut Halim & Kusufi (2012), analisis data keuangan yang dilakukan dalam operasional manajemen akuntansi diperlukan untuk penyusunan rencana pendapatan dan belanja serta pemilihan prioritas alokasi anggaran pemerintah. Hal ini menjamin perencanaan dan pengaturan dilaksanakan secara akurat dan benar sesuai kebutuhan dan batasan rencana belanja pemerintah.

Selain itu, proses pengelolaan akuntansi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui pelaksanaan pedoman pembukuan pemerintah, pedoman terkait, dan pembukuan yang dilatih oleh para eksekutif, maka pertukaran moneter termasuk otoritas publik dapat dicatat, diperkirakan dan diumumkan dengan tepat (UU No. 71 Tahun 2010). Dengan demikian, masyarakat dapat terjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan pembukuan eksekutif menambah penerapan sistem pengendalian internal yang kompeten yang mengatur administrasi keuangan pemerintah dalam

hal pengelolaan dan pengendalian (COSO, 2013). Untuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi atau inefisiensi dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat, operasi akuntansi manajemen sering kali melibatkan analisis laporan keuangan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah.

Demikian pula, pembukuan yang dilakukan para eksekutif memastikan akses pemerintah terhadap informasi moneter yang dapat diandalkan dan tepat untuk tujuan memenuhi komitmen sosialnya (tanggung jawab publik). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah yang berkualitas seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan hasil dari praktik pengelolaan akuntansi yang baik.

Demikian pula navigasi vital pemerintah bergantung pada informasi moneter mulai dari pembukuan tugas dewan (Mahmudi, 2016). Agar pilihan strategi pemerintah tepat dan bermanfaat dalam mencapai tujuan kemajuan masyarakat, kegiatan pembukuan dewan termasuk pemeriksaan keuangan dan audit pelaksanaan memberikan informasi penting.

Terakhir, kegiatan pengelolaan akuntansi menjamin pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku, persyaratan undang-undang, dan standar akuntansi (Peraturan Menteri Keuangan No. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; 213/PMK.05/2013). Untuk menjaga konsistensi pedoman, penting bagi para eksekutif pembukuan untuk memahami dan melatih pedoman yang berkaitan dengan keuangan dan pembukuan pemerintah. Salah satu permasalahan strategi utama yang saat ini dihadapi Indonesia adalah tanggung

jawab atas kinerja organisasi pemerintah, mengingat semakin meningkatnya pedoman tanggung jawab pelaksanaan kelembagaan akan mempengaruhi upaya membangun pemerintahan yang baik. Memperluas pedoman tanggung jawab atas penyajian organisasi pemerintah juga berdampak pada bidang politik dan keuangan secara luas (Agus Dwiyanto, 2016). Di bidang politik, peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan di bidang perekonomian, perbaikan iklim investasi akan didorong. Tidak adanya pengawasan masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam operasional lembaga-lembaga tersebut merupakan salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga tersebut di Indonesia.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *good governance* oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *good governance* berperan signifikan dalam memperbaiki proses pelaporan keuangan pada instansi pemerintahan. Sementara itu, penelitian oleh Pratama (2022) mengungkap bahwa keberadaan mekanisme pengawasan yang kuat, seperti audit internal dan eksternal, mampu mengurangi potensi penyimpangan dalam manajemen akuntansi di sektor publik. Selain itu, studi terbaru oleh Nugroho (2023) mempertegas bahwa implementasi *good governance* yang konsisten dapat mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya dalam aspek pengendalian biaya dan perencanaan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan *good governance*, semakin optimal pula aktivitas manajemen akuntansi yang dijalankan oleh instansi

pemerintahan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Taufik Hidayat, Annie Mustika Putria, dan Neng Murialtia (2021) tentang pengaruh *good governance*, kompetensi, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kampar menunjukkan hasil bahwa sebagian bahwa *good governance* dan *accounting control* tidak berpengaruh, sedangkan *competence* mempunyai pengaruh signifikan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Kampar.

Fenomena tata kelola organisasi publik di pemerintahan Kabupaten Majene yang terjadi saat ini menggambarkan kompleksnya dinamika yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan yang berdampak pada efektivitas dan kredibilitas lembaga-lembaga pemerintah. Kabupaten Majene menghadapi defisit keuangan pada tahun anggaran 2022, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mejene belum memanfaatkan potensi pendapatannya secara maksimal dan belum mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien sehingga menyebabkan belanja daerah meningkat tanpa memperhatikan anggaran daera target pendapatan. Setiap instansi pemerintah Majene merasa prihatin dengan fenomena ini, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Majene yang sedang melakukan reformasi tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik serta reformasi birokrasi untuk meningkatkan pendapatan, daya tanggap serta kualitas pelayanan publik.

Melihat gambaran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami sebagai tugas akhir dengan judul **“Pengaruh *Good Governance***

Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan Majene (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene)” .

1.2 RumusanPermasalahan

Berdasarkan landasan yang telah dijelaskan di atas, maka definisi permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pada Bapenda Majene, bagaimana *good governance* mempengaruhi aktivitas manajemen akuntansi di Bapenda Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *good governance* mempengaruhi aktivitas manajemen akuntansi di Bapenda Majene.

1.4 Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini bertujuan untuk memperluas perspektif dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas manajemen akuntansi dan *good governance*. Beberapa keuntungan umum yang didapat dari melakukan peninjauan ini antara lain :

1. Manfaat bagi Bapenda Majene

Dengan adanya ujian ini dipercaya dapat memberikan komitmen atau pengetahuan kepada Bapenda Majene dalam hal penyelenggaraan *good governance*. komponen-komponen dalam aktivitas pengelolaan akuntansi pemerintahan yang dilaksanakan oleh para eksekutif, sehingga pengelolaan akuntansi dewan dapat berjalan dengan baik dengan menyelenggarakan *good governance*.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Eksplorasi ini juga menjadi salah satu syarat kelulusan dan sertifikasi empat tahun di Perguruan Tinggi Sulawesi Barat, serta memberikan informasi baru tentang *good governance* sehingga menambah ilmu dan pengalaman baru.

3. Manfaat bagi pembaca

Pendalaman ini juga dapat menambah pemahaman dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca mengenai *good governance* dalam aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Teori *Stewardship*

Donaldson dan Davis memperkenalkan teori *stewardship* pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan keadaan ketika manajer atau pemimpin tidak didorong oleh ambisi pribadi, melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan kunci organisasi demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Teori ini mengasumsikan bahwa ada kepercayaan antara pemilik (*principals*) dan manajer (*steward*). Manajer akan bertanggung jawab penuh untuk kepentingan pemilik. Ada keterkaitan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi dengan kepuasan manajer. Dalam teori ini, motivasi utama *steward* adalah kepuasan saat berhasil memenuhi kebutuhan organisasi dengan optimal. *Steward* akan melindungi dan mengelola sumber daya organisasi secara maksimal agar organisasi dapat bertahan. *Steward* akan membuat keputusan dan tindakan terbaik demi kepentingan organisasi.

Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan efektivitas manajemen dan kepala sekolah, menurut Haliah (2012). Dalam penelitian akuntansi, teori *stewardship* dapat dimanfaatkan untuk organisasi sektor publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi untuk organisasi sektor publik pada awalnya membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi dari kepala sekolah dan pengurus.

Dengan meningkatnya kompleksitas, spesialisasi akuntansi, dan kemajuan organisasi sektor publik, para pimpinan merasa semakin sulit untuk melaksanakan tanggung jawab manajemen sendiri. Terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan dan fungsi manajerial. Akuntansi menjadi semakin penting dalam mencapai kesejahteraan publik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah.

Akuntansi banyak digunakan sebagai cara untuk mengendalikan berbagai hal dan melaporkan bagaimana manajer mengelola keuangan dan sumber daya manusia. Pemilik sumber daya mendelegasikan administrasi kepada pihak yang mempunyai kualifikasi lebih tinggi (manajer atau manajemen) karena adanya pembatasan. Kepercayaan dan tujuan bersama yang sejalan dengan tujuan organisasi merupakan landasan hubungan kontraktual antara pelaku dan manajer. Salah satu model yang dapat digunakan dalam bisnis sektor publik adalah teori manajemen.

Beberapa asumsi utama dalam teori *stewardship* adalah:

- a. Terdapat hubungan kepercayaan antara *steward* dan pemilik.
- b. *Steward* motivasi untuk bertindak sebaik mungkin demi kepentingan organisasi.
- c. Ada keselarasan kepentingan antara *steward* dan pemilik
- d. *Steward* berupaya mencapai sasaran organisasi.
- e. Keberhasilan *steward* diukur dari kinerja organisasi, bukan motivasi individu.

Berdasarkan teori *stewardship*, otoritas publik sebagai *steward* dianggap bertindak secara *mindfulness* dan fokus pada kepentingan individu (*chiefs*). Dalam situasi yang unik ini, pelaksanaan sistem administrasi yang baik dipandang sebagai upaya otoritas publik untuk memenuhi perintahnya dalam mengawasi aset publik secara lugas dan bertanggung jawab.

Pemerintah akan didorong untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan akuntansinya dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa penatalayan pemerintah akan berusaha mencapai tujuan organisasi (kepentingan masyarakat) dengan cara yang paling efektif.

Implikasi dari teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah mampu menjelaskan:

- a. *Good governance* akan mendorong pemerintah untuk melakukan aktivitas manajemen akuntansi secara optimal demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu/golongan tertentu.
- b. Ada keselarasan kepentingan antara pemerintah (*steward*) dengan rakyat (*principals*), sehingga penerapan *good governance* dalam manajemen akuntansi pemerintahan merupakan upaya untuk mencapai sasaran organisasi (kepentingan publik).
- c. Keberhasilan pemerintah dalam manajemen akuntansi akan diukur berdasarkan kinerja organisasi pemerintah dalam menyediakan layanan

publik yang berkualitas, bukan hanya didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

2.1.2 Good Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Governance

Dari segi arti "*Good*" berarti baik, sedangkan "*Governance*" berarti pemerintahan, jadi gabungan kedua kata tersebut mengacu pada pemerintahan yang hebat. Dalam konteks *good governance*, konsep "baik" mengacu pada dua hal. Pertama, nilai-nilai yang membantu masyarakat mencapai tujuan keadilan sosial, kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan serta mendukung aspirasi dan keinginan masyarakat. Kedua, bagian praktis dari otoritas publik mahir dan berhasil menyelesaikan kewajibannya untuk mencapai tujuan tersebut (KPK, 2016: 6).

Suatu pemerintahan yang menciptakan dan melaksanakan keunggulan keterampilan yang mengesankan, tanggung jawab, keterusterangan, bantuan yang brilian, sistem berbasis suara, produktivitas, kelangsungan hidup, hukum dan ketertiban dan pengakuan publik ditandai dengan pemerintahan yang hebat, sesuai dengan undang-undang resmi Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 2.

Good Governance adalah pelaksanaan perbaikan yang solid dan dapat diandalkan oleh para eksekutif, yang sesuai dengan standar pemerintahan mayoritas dan sektor bisnis produktif, menghindari hamburan cadangan spekulasi, dan mencegah penurunan nilai baik secara strategis maupun otoritatif", sesuai dengan pernyataan *World Bank*. "*Good Governance* juga mencakup pelaksanaan

disiplin moneter dan produksi sistem yang sah dan politis untuk pengembangan kegiatan bisnis” (Mardiasmo, 2018:23).

Penerapan manajemen pembangunan yang solid dan akuntabel serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi politik dan administratif merupakan contoh *Good Governance*.

Good Governance menjunjung tinggi disiplin moneter dan membuat struktur yang sah dan politis untuk pengembangan kegiatan bisnis. *Unified Public Advancement Program* (UNDP) mendefinisikan *Good Governance* sebagai “pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan.” Menurut UNDP, pemerintahan yang baik tidak mementingkan sudut pandang politik, keuangan, dan otoritas di kalangan eksekutif negara (Mardiasmo, 2018: 31).

Untuk menerapkan pengelolaan daerah yang efektif dan mencapai apa yang disebut sebagai *Good Governance*, kemajuan teknologi menjadi faktor utama. Salah satu upaya yang dapat diandalkan oleh pemerintah adalah penerapan tata pemerintahan yang baik. Sesuai dengan prinsip organisasi pemerintahan yang terbebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme, pemerintahan harus menerapkan sentralisasi untuk mencapai *Good Governance* (Mardiasmo, 2018: 26).

Menurut BPK (2015), *Good Governance* memiliki dua implikasi utama:

- a. Nilai-nilai yang mengutamakan aspirasi masyarakat dan dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri, hidup berkelanjutan, dan tumbuh secara sosial.

- b. Fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan yang baik merupakan suatu kaidah yang patut diterapkan oleh landasan-landasan penyelenggaraan negara, termasuk otoritas publik, untuk mencapai tujuan publik dan tujuan negara serta bernegara.

2.1.2.2 Prinsip *Good Governance*

Dalam upaya mendorong berkembangnya *Good Governance* dalam pelayanan publik, pemerintah pusat menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan sepenuhnya untuk mengakui pemerintahan yang besar, sebagaimana tergambar dalam pasal 20. Asas-asas Umum Administrasi Negara harus menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, yang antara lain meliputi :

- a. Aturan keyakinan yang sah mengharapkan bahwa setiap program atau tindakan yang dilaksanakan harus mengikuti peraturan dan pedoman yang sesuai.
- b. Permintaan aturan negara mengharapkan organisasi negara menyetujui pengaturan hukum yang relevan serta visi dan misi yang sesuai.
- c. Aturan kepentingan publik mengharapkan bahwa strategi administrasi berfokus pada kepentingan publik di atas kepentingan pertemuan atau kepentingan orang banyak.

- d. Karena masyarakat ikut serta dalam pengawasan, maka prinsip keterbukaan mengharuskan masyarakat dapat mengakses atau memantau hasil program atau kegiatan pemerintah.
- e. Standar proporsionalitas mengharuskan pendekatan dan proyek menyesuaikan kebebasan dan komitmen agar tidak merugikan masyarakat.
- f. Aturan keterampilan yang mengesankan mengharapakan bahwa kewajiban dan komitmen diselesaikan sesuai dengan tugas dan elemen mendasar dari setiap pemerintahan.
- g. Standar tanggung jawab, yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang mendukung inisiatif dan tindakan harus bertanggung jawab kepada daerah dan perguruan tinggi setempat.
- h. Tujuan efisiensi adalah menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil kinerja terbaik, termasuk sumber daya manusia dan nonmanusia.
- i. Gagasan tentang efektivitas, yang mengatakan bahwa setiap keputusan harus baik bagi masyarakat dan pekerjaan.

Dalam melaksanakan *Good Governance*, UNDP sebagaimana dirujuk dalam Mardiasmo (2018:23) membedakan beberapa kualitas penting, khususnya:

- a. Partisipasi berarti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingan dan tujuannya. Kebebasan berserikat, berekspresi, dan keterlibatan konstruktif merupakan landasan partisipasi ini.

- b. Hukum dan ketertiban, suatu sistem yang sah yang adil dan dilaksanakan tanpa pemisahan.
- c. Kebebasan mengakses informasi dan transparansi Masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya harus mempunyai akses langsung terhadap informasi untuk kepentingan publik.
- d. Daya tanggap: Organisasi pemerintah harus cepat dan tanggap dalam melayani daerah setempat dan mitranya.
- e. Orientasi konsensus menekankan pada kepentingan bersama.
- f. Nilai : Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan pemerataan.
- g. Pengelolaan sumber daya publik dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- h. Tanggung Jawab: Setiap gerakan yang diselesaikan oleh otoritas publik harus bertanggung jawab kepada daerah setempat.
- i. Visi strategis: Baik pemerintah maupun pengorganisasi masyarakat perlu memiliki visi jangka panjang.

Menurut Bank Dunia, tiga dari sembilan kriteria saling terkait dan dapat dimasukkan oleh akuntansi sektor publik untuk mencapai pemerintahan yang baik: akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi (dalam Mardiasmo, 2018).

2.1.2.2.1. Transparansi

Menurut Saribu dan Serdang (2017), transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah keadaan di mana seluruh pilihan dan siklus pengelolaan kebijakan yang dinamis dapat dilihat oleh semua pihak. Kata deskriptif "terus terang" adalah sumber dari istilah "keterusterangan". Pedoman keterbukaan atau

keterusterangan dalam pemerintahan daerah merupakan suatu aturan yang menjamin masyarakat berada pada jalur yang tepat untuk mendapatkan data tentang organisasi pemerintahan yang tepat, asli, dan tidak merugikan. daerah dengan tetap menjaga hak istimewa perseorangan, perkumpulan, dan rahasia negara, sesuai dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari fitnah, konspirasi, dan nepotisme. Transparansi atau keterbukaan adalah tersedianya informasi yang tepat waktu, tepat, dan akurat mengenai perumusan kebijakan publik.

Beberapa langkah transparansi yang diidentifikasi oleh Mardiasmo (2018), antara lain:

- a. Berikan data yang jelas mengenai metode, biaya dan kewajiban.
- b. Meningkatkan aksesibilitas informasi.
- c. Buatlah lingkaran keluhan untuk mengatasi pelanggaran atau permintaan pembayaran.
- d. Mengupayakan perkembangan data melalui kerja sama dengan asosiasi non-legislatif dan media.

2.1.2.2.2 Partisipasi

Dengan menggunakan badan agen, wilayah setempat mengambil bagian dalam navigasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Afiliasi yang menguntungkan, evaluasi, dan peluang investasi diperlukan untuk kontribusi ini (Mardiasmo, 2018). Berikut ini adalah tanda-tanda seseorang telah memasuki wilayah setempat:

- a. Adanya forum yang memungkinkan diskusi terbuka, terfokus, dan representatif.
- b. Kapasitas lingkungan mengambil bagian dalam siklus yang unik.

2.1.2.2.3 Akuntabilitas Publik

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban kinerja dan tindakan pemimpin individu atau kelompok (Neni, Nurlela, Karlina, 2021). S

ebagaimana dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018), tanggung jawab publik adalah kewajiban seorang penyelenggara hukum (ahli) untuk menyampaikan, melaporkan dan mengungkap segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada penyelenggara hukum (pimpinan), yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk meminta. tanggung jawab. Ada penanda tanggung jawab yang berbeda, misalnya:

- a. Prosedur pengambilan keputusan mematuhi kriteria moral dan cita-cita administrasi yang baik, terdokumentasi, dan tersedia bagi mereka yang memerlukannya.
- b. Sasaran kebijakan harus ditetapkan dengan jelas, terhubung dengan visi dan misi perkumpulan, dan memenuhi setiap aturan material.

Sasaran prioritas operasional harus dapat dilaksanakan dan konsisten. Menurut Mardiasmo (2018), tanggung jawab publik dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan mengacu pada akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya saja pertanggungjawaban satuan kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat kepada MPR, dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Tanggung jawab yang menjangkau wilayah lokal yang lebih luas disebut dengan tanggung jawab datar. Dalam konteks entitas pemerintah, praktik pemberian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengungkapan kegiatan keuangan dan kinerja pemerintah disebut sebagai akuntabilitas publik. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu merespon permintaan informasi guna melindungi hak-hak masyarakat.

Akuntabilitas, berbeda dengan *stewardship*, merupakan konsep yang lebih luas. Sementara akuntabilitas mengacu pada kewajiban pengurus terhadap mereka yang bertanggung jawab, *stewardship* mengacu pada pengelolaan suatu kegiatan secara ekonomis dan efektif tanpa keharusan untuk melaporkan semuanya.

Akuntabilitas dipersepsikan sebagai salah satu tolok ukur penyelenggaraan negara dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Sempurna dan Terbebas dari Kehinaan, Persekongkolan, dan Nepotisme. Pemegang kedaulatan tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional wajib bertanggung jawab atas seluruh hasil program dan kegiatan yang diamanatkan negara, sesuai dengan prinsip akuntabilitas ke-13. Terwujudnya pemerintahan

yang melayani kepentingan umum dan berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah perlu mengalami berbagai perubahan.

Mardiasmo (2018: 26) mendefinisikan reformasi sebagai pembaruan alat dan instrumen yang mendukung operasional lembaga pemerintah agar lebih terjangkau, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Reformasi tidak hanya mencakup perubahan dalam struktur kelembagaan. Salah satu cara masyarakat modern memanfaatkan teknologi adalah melalui pembaruan alat. Pemerintahan dapat benar-benar mencerminkan cita-cita *good governance* dengan mengikuti perkembangan globalisasi, menggunakan alat untuk mendukung program, dan memastikan transparansi informasi pemerintahan. Penerapan teknologi yang hemat biaya untuk mencapai tujuan akan mempermudah pencapaian prinsip-prinsip *good governance*.

2.1.2.3 Ciri - Ciri *Good Governance*

Sesuai dengan ide pendekatan UNDP, kualitas administrasi yang baik dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memasukkan semua pertemuan dalam kewajiban dan keterusterangan, serta menjamin kewajaran dan keberlangsungan.
- b. Advokasi supremasi hukum.
- c. Pastikan konsensus masyarakat menentukan prioritas ekonomi, politik, dan *social*.
- d. Mempertimbangkan kepentingan kelompok miskin dan kelompok yang putus asa dalam siklus dinamis dalam hal alokasi aset perbaikan.

2.1.3 Manajemen Akuntansi Pemerintahan

2.1.3.1 Manajemen Sektor Publik

Metode dan praktik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola lembaga dan dana publik untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai manajemen sektor publik. Hal ini mencakup berbagai tugas seperti pengorganisasian, pengalokasian dana, penerapan kebijakan, pengawasan terhadap berbagai hal, penilaian, dan penyediaan layanan publik. Mencapai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan layanan dan inisiatif pemerintah adalah tujuan utama. Untuk menjamin penggunaan sumber daya sebaik mungkin dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan secara sosial dan ekonomi, manajemen sektor publik juga memasukkan prinsip-prinsip manajemen berkelanjutan dan ekonomi.

Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengaturan pelayanan masyarakat merupakan tujuan lain dari manajemen publik yang didefinisikan oleh Nor Ghofur (2014) sebagai manajemen pemerintahan.

Untuk memastikan bahwa operasi suatu organisasi terkendali dan tujuannya tercapai, diperlukan manajemen. Untuk memenuhi tujuan utama pelayanan yaitu menjamin keridhaan masyarakat, maka instansi pemerintah khususnya yang menangani permasalahan pelayanan publik harus mengelola proses penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien.

Hasibuan (2019:9) menegaskan bahwa manajemen adalah ilmu sekaligus seni mengelola proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya manajemen diartikan oleh Handoko (2017:8) sebagai proses pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha anggota suatu organisasi, serta pemanfaatan sumber daya lain organisasi, guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. . Sebaliknya, manajemen didefinisikan oleh Widodo (2015) sebagai proses di mana satu atau lebih individu mengoordinasikan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh satu individu.

Tujuannya adalah untuk memberikan layanan publik yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

- a. Ruang lingkup manajemen sektor public
- b. Aset manusia para eksekutif
- c. Pengelolaan keuangan negara
- d. engelolaan operasional
- e. pengelolaan strategi dan kebijakan
- f. Manajemen teknologi informasi
- g. Tata kelola dan akuntabilitas
- h. Kemitraan publik-swasta

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa manajemen sektor publik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengaturan, pengarahan, perencanaan, dan pengawasan sumber daya dalam konteks pemerintahan dan organisasi nirlaba. Fokus utamanya adalah untuk mengelola kebijakan dan program pemerintah dengan cara yang efisien, efektif, dan akuntabel, sambil memberikan pelayanan

publik. Aspek-aspek penting dalam manajemen sektor publik meliputi manajemen kinerja, hubungan masyarakat dan komunikasi, pengelolaan keuangan publik, perencanaan strategis, dan alokasi sumber daya.

2.1.3.2 Peran Manajemen Pemerintahan

Tugas dan tindakan yang dilakukan oleh eksekutif dan manajer di tingkat federal untuk menjamin bahwa operasi pemerintah dilaksanakan dengan sukses, ekonomis, dan sejalan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat secara kolektif disebut sebagai peran manajemen pemerintah. Posisi ini melibatkan sejumlah aspek dalam menjalankan lembaga pemerintah dan melaksanakan arahan legislatif. Tugas dan tindakan yang dilakukan oleh eksekutif dan manajer di tingkat federal untuk menjamin bahwa operasi pemerintah dilaksanakan dengan sukses, ekonomis, dan sejalan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat secara kolektif disebut sebagai peran manajemen pemerintah. Posisi ini melibatkan sejumlah aspek dalam menjalankan lembaga pemerintah dan melaksanakan arahan legislatif. Berikut adalah beberapa contoh peran manajemen pemerintah:

- a. **Perencanaan Kebijakan:** Manajemen pemerintah bertugas menciptakan dan mengatur program yang memenuhi tuntutan masyarakat. Mereka perlu menilai permasalahan yang ada, menemukan jawaban yang bisa diterapkan, dan membuat rencana tindakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. **Manajemen Anggaran:** Manajemen pemerintah harus memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan pemerintah yang efisien dan efektif merupakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup penyusunan

anggaran, pengawasan pengeluaran, dan tanggung jawab atas penggunaan dana publik.

- c. **Manajemen Sumber Daya Manusia:** Pengelolaan aparatur pemerintah dan peningkatan kapasitasnya berada di bawah lingkup manajemen pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa pekerja mempunyai kemampuan dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar.
- d. **Pengawasan dan Pengendalian:** Manajemen pemerintah harus mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah untuk menjamin bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan. Hal ini termasuk menjaga kepatuhan hukum dan peraturan, memberantas korupsi, dan mengelola birokrasi.
- e. **Komunikasi dan Hubungan Masyarakat:** Komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan suatu keharusan bagi pengelolaan pemerintahan. Untuk meningkatkan standar pelayanan publik, mereka harus mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan inisiatif pemerintah.
- f. **Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti:** Keputusan yang diambil oleh manajemen pemerintah harus didukung oleh fakta atau data. Hal ini menjamin bahwa landasan kebijakan dan inisiatif pemerintah adalah data yang akurat dan dapat dipercaya.
- g. **Manajemen Krisis:** Manajemen pemerintahan perlu bersiap untuk menangani keadaan darurat atau krisis yang mungkin terjadi. Mereka perlu dilengkapi

dengan rencana darurat yang menyeluruh dan mampu bertindak cepat dan tegas ketika diperlukan.

2.1.3.3 Pengertian Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan

Kegiatan pengelolaan akuntansi pemerintahan melibatkan berbagai prosedur dan tindakan untuk menjamin tanggung jawab fiskal, transparansi, dan efektivitas. Manajemen akuntansi pemerintahan adalah proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Menjamin efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan tujuan utama pengelolaan akuntansi pemerintahan. Untuk menjamin bahwa dana publik digunakan secara efektif dan untuk meningkatkan pelayanan publik, pengelolaan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah didukung oleh tindakan tersebut.

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengelolaan akuntansi pemerintahan” adalah seperangkat prosedur dan kegiatan yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan melaporkan sumber daya keuangan negara secara bertanggung jawab dan terbuka. Kegiatan Pengelolaan Akuntansi Pemerintahan antara lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

- a. Penyusunan Anggaran
- b. Pelaksanaan Anggaran
- c. Pengadministrasian Keuangan
- d. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2 Penelitian Terdahulu / Tinjauan Empirik

Berikut ini adalah tabel yang menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sehubungan dengan penelitian tersebut. Kedua, penelitian ini difokuskan pada Pengaruh *Good Governance* terhadap Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Sari, N. P., Adiputra, I. M. P., & Herawati, N.T Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 121-136. 2020	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> terhadap Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap aktivitas manajemen akuntansi pemerintah daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.	Sama-sama meneliti tentang <i>good governance</i> .	Peneliti terdahulu dalam variabel Y terdapat indikator etika dan integritas, sedangkan peneliti sekarang terdapat indikator kinerja keuangan pemerintahan dan manajemen risiko.
2.	Ayu Ni'matin Nada dan Novi Khoiriaw	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara terpisah, penerapan <i>good governance</i> dan pengendalian internal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja	Sama-sama meneliti tentang <i>good governance</i> .	Peneliti terdahulu meneliti pengaruh <i>good governanc</i>

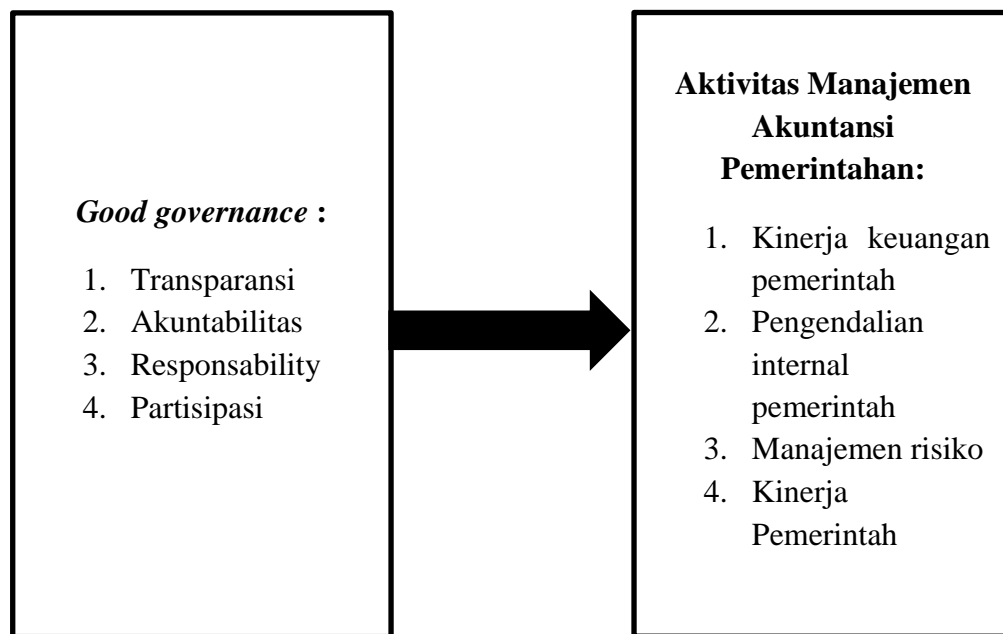
	ati (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4 No. 10 Mei 2022)	Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa pada Kecamatan Wonodadi.	aparatus pemerintah desa di 11 desa di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Secara keseluruhan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa di daerah yang sama.		e dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah, sedangkan peneliti sekarang terdapat indikator kinerja keuangan pemerintah, pengendalian internal pemerintah dan manajemen risiko
3.	Deisy Christin Makaliki s, Ventje Ilat dan Rudy J. Pusung (2022) (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4 No. 10 Mei 2022)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado	Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip hukum transparansi dan partisipasi telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Namun, meskipun prinsip transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum sudah diterapkan dengan baik, masih terdapat kendala dalam proses administrasi. Kendala ini disebabkan oleh perubahan regulasi yang terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, Sekretariat sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut.	Sama-sama meneliti tentang <i>good governance</i> .	Peneliti terdahulu meneliti pengelolaan keuangan, sedangkan peneliti sekarang terhadap aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan.
4.	Santi	Pengaruh <i>Good</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi	Sama-sama meneliti	Peneliti terdahulu

	Septiana (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 10, Oktober 2021)	<i>Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa</i>	berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.	tentang <i>good governance</i> .	meneliti kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan peneliti sekarang terhadap aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan.
5.	Raibbatol Advia , Agus Satrya Wibowo , M. (Media Informasi Akuntansi dan Keuangan Vol. 14, No. 1, January 2022	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan <i>Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan <i>Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.</i>	Sama-sama meneliti tentang <i>good governance</i> .	Peneliti terdahulu meneliti kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti sekarang terhadap aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan.

Diolah dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019), kerangka teori yang kokoh akan memperjelas hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dengan cara ini, secara hipotetis penting untuk memahami bagaimana faktor bebas dan faktor bawahan berhubungan satu sama lain. Kerangka penelitian memberikan penjelasan mengenai hubungan yang terjalin antara variabel independen dan dependen, dengan aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan sebagai variabel dependen dan *good governance* sebagai variabel independen. Berikut struktur konseptual penelitiannya:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Mengingat landasan, definisi masalah, tujuan penelitian, dan premis hipotetis yang dipahami pada sub-bab sebelumnya, serta sistem yang diduga secara alami diungkapkan, maka spekulasi eksplorasi dapat dibentuk sebagai berikut:

H1: *Good Governance* berpengaruh signifikan Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan.

H0 :*Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2015). Akuntabilitas Pemerintah Pusat. Jakarta: BPK RI.
- Buku "Akuntansi Pemerintahan" oleh Indra Bastian (2010), yang menjelaskan secara rinci tentang aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan.
- Buku "Public Management Reform: A Comparative Analysis" oleh Pollitt dan Bouckaert (2011).
- Buku "*Public Management: Theory and Practice*" oleh Ott, Hyde, dan Shafritz (2017).
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. (2013). *Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary*.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Dwiyanto, Agus. (2014). Kebijakan Pelayanan Publik era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. (2016). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghofur, Nor. (2014). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haliah. (2012). Teori Keagenan (*Agency Theory*). Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. (2017). Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, hal. 8.
- Hasibuan, Melayu S.P. (2019). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 9.
- Jurnal "Penerapan Aktivitas Manajemen Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara" oleh Siti

Maryam dan Muhammad Rizal (2018), yang membahas penerapan aktivitas manajemen akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Jurnal "Public Management Review" yang diterbitkan oleh Taylor & Francis Group.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2016). Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Cetakan Kelima. Jakarta: KPK, halaman 6.

Laporan "*Governance at a Glance*" oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 23,26 dan 31.

Neni, Nurlela, Karlina. (2021). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Sungai Upih Kecamatan Rengat Barat". *Jurnal Public Policy*, Vol. 7 No. 1.

Pedoman "*Principles of Good Governance in the 21st Century*" oleh Komisi Eropa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saribu, Fredy Jack & Serdang, Albertus. (2017). "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Simalungun". *Jurnal EK&BI*, Vol. 3 No. 2.

Sudiarti, Sri. (2019). "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan". *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 2 No. 1.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik Hidayat, Annie Mustika Putria, dan Neng Murialtia (2021): Hidayat, Taufik., Putria, Annie Mustika., & Murialtia, Neng. (2021). "Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*. (2009). *What is Good Governance?* Diakses dari <https://www.unescap.org/resources/what-good-governance>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Accounting Principles* (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Widasari, Kadek Indah dan I.G.A.M Asri Dwija Putri. (2018). "Pengaruh *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1.
- Widodo. (2015). *Manajemen Mutu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.